

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian dengan judul “Hubungan antara Pemberitaan Seputar RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Surat Kabar Suara Merdeka dengan Sikap Masyarakat Petani Tembakau di Temanggung”, peneliti memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara variabel (X) pemberitaan seputar RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Surat Kabar Suara Merdeka dengan variabel (Y) sikap masyarakat petani tembakau di Temanggung dan hubungan tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel (Z) yaitu motif.

Hal tersebut dapat dijelaskan, variabel (X) yang terdiri dari frekuensi, durasi, dan atensi. Frekuensi dan durasi membaca berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yaitu rendah. Sedangkan atensi menunjukkan responden memiliki ketertarikan tinggi dalam mengikuti atau menyimak pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka. Dapat disimpulkan bahwa petani tembakau di kabupaten Temanggung memiliki frekuensi dan durasi membaca berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka yang sangat rendah namun memiliki ketertarikan tinggi dalam mengikuti atau menyimak pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka.

Variabel (Y) dapat dijelaskan, Sikap dengan 3 komponen setelah membaca pemberitaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka tersebut yaitu secara kognisi petani tidak memiliki pengetahuan atau wawasan tentang isi dan tujuan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau, hal ini menyebabkan terjadinya perasaan tidak senang dan takut terhadap adanya pemberitaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau melalui Koran Suara Merdeka. Maka konatif yang terbentuk adalah bentuk aksi tidak mendukung RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau. Namun, aksi tidak mendukung tersebut tidak diikuti dengan aksi terlibat secara langsung dalam pengawalan pembentukan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau. Hal ini menunjukkan tingkat kognitif atau pengetahuan responden tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau dari membaca Suara Merdeka masih rendah. Sehingga keinginan untuk tidak menyetujui, tidak diikuti tindakan untuk mengawal secara langsung pembentukan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau.

Variabel (Z) motif, dalam penelitian ini terlebih pemuasan kebutuhan akan informasi mengenai berita kebijakan pemerintah mengeluarkan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau. Koran Suara Merdeka dalam hal ini, belum memberikan kepuasan akan motif kebutuhan informasi untuk responden melainkan hanya memenuhi dalam tahap kebutuhan diversifikasi dan kebutuhan identitas personal.

Peneliti menemukan, terdapat tingkat hubungan sedang antara variabel (X) terpaan pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka dengan variabel (Y) sikap petani tembakau di Temanggung,

namun tidak dipengaruhi dengan variabel kontrol motif menggunakan Koran Suara Merdeka. Dapat dinyatakan bahwa hipotesis penelitian ini terbukti atau dengan kata lain dapat diterima. Maka koefisien korelasi terpaan dan sikap tanpa variabel kontrol sebesar 0,452 yang berarti tingkat hubungannya sedang. Kemudian dengan adanya variabel kontrol motif maka koefisien korelasi terpaan dan sikap sebesar 0,210 dengan nilai signifikansinya 0,009 yang berarti hubungannya sangat rendah. Hal ini menggambarkan bahwa ada atau tidak adanya variabel kontrol yaitu variabel motif tidak mempengaruhi hubungan antara terpaan dan sikap.

Tingkat hubungan sedang antara variabel (X) terpaan dan variabel (Y) Sikap petani tembakau, menunjukkan adanya faktor lain diluar faktor terpaan media koran Suara Merdeka yaitu faktor komunikasi personal dengan keluarga dan teman-teman sebagai sumber informasi petani tembakau mengenai RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang dapat mempengaruhi sikap petani. Dapat dilihat pada tabel 3.9, bahwa petani pertama kali mengetahui berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau dari keluarga (1,9%) dan terutama dari teman (28,4%).

B. Saran

Peneliti memberikan saran bagi pemerintah, petani tembakau, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

- **Bagi Pemerintah**

Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau dengan mempertimbangkan mata pencaharian utama

petani tembakau di Temanggung. Jika memang pemerintah tetap menetapkan RUU menjadi UU yang memang harus ditaati oleh petani, pemerintah harus memberi solusi tanaman pengganti serta memberi waktu dan pendampingan kepada petani untuk menyesuaikan cara mengolah sampai dengan proses penanaman tanaman komoditas baru. Sikap masyarakat yang tidak menyetujui adanya RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau, menguatkan saran peneliti kepada pemerintah.

- Bagi Petani Tembakau

Petani tembakau sebaiknya lebih sering mengakses media sebagai salah satu tindakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menyangkut RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau.

- Bagi Peneliti lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis, dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa kekurangan yaitu pada pemilihan pemberitaan dan kuesioner. Pemberitaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau sering mendapat porsi pemberitaan dalam Suara Merdeka, tetapi terkadang pada bulan tertentu porsi pemberitaannya berkurang, bahkan kadang tidak ada. Sedangkan dalam kuesioner, terdapat kurangnya variasi pertanyaan sehingga peneliti kurang mendapatkan data yang mendalam.

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini sebaiknya mempertimbangkan (1) teori efek media apa yang harus digunakan sesuai dengan kondisi terkini (2) pemilihan metode penelitian sebaiknya perlu mencermati karakteristik responden menurut

profesinya.(3) Untuk kuesioner, sebaiknya peneliti lain dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan harus memiliki pertanyaan yang lebih bervariasi agar mendapatkan temuan data yang lebih mendalam. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya tingkat hubungan antar variabel dapat menunjukkan hubungan yang kuat ataupun sangat kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiat Komala Erdinaya. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Griffin, Em. 2003. *A first Look at Communication Theory*. 5th Ed. New York: McGraw Hill Companies.
- Gunadi. 1998. Himpunan Istilah Komunikasi. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Komputer, Wahana. 2009. Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 16.0. Jakarta: Salemba Infotek.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Littlejohn, Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa Edisi Kedua (Suatu Pengantar). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mueller, Daniel. 1992. Mengukur Sikap Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmat, Jallaludin. 1984. Metode Penelitian Komunikasi komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rachmat, Jallaludin. 2007. Psikologi komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santosa, Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan MS. Excell dan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey. Yogyakarta: LP3ES.
- Spark, Glenn. 2006. *Media effect research: A Basic Overview Third Edition*. Canada.

- Subyantoro, FX. Suwanto. 2007. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andi.
- Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Sumadiria, Haris. 2006. Jurnalistik Indonesia (Menulis Berita dan Feature). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suprpto, Tommy. 2006. Pengantar Teori Komunikasi, Yogyakarta: Media Pressindo
- Uchjana, Onong. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Walgito, Bimo. 1983. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Walgito, Bimo. 2002. Psikologi Sosial edisi revisi kedua (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Andi Offset.

Skripsi dan Tesis

- Aji, Andika Gesta. 2010. Laporan Skripsi: Pengaruh Terpaan Berita Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022 di Tabloid Bola Terhadap Sikap Pembaca. Yogyakarta: FISIP Universitas Atma Jaya.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2003. Laporan Tesis: Efisiensi Ekonomi Relatif dan Analisis Pendapatan Usaha Tani Tembakau berdasarkan Sistem Penguasaan Lahan Sawah di Kabupaten Temanggung. Semarang: Magister Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Koran

Koran Suara Merdeka

Situs Internet

www.Kompas.com
www.suaramerdeka.com
www.suarapembaruan.com
www.jelajahbudaya.com
www.Temanggung.com (website resmi kota Temanggung)

Sumber lain

Draft RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau

Profil Sejarah Suara Merdeka dari *Public Relation* Suara Merdeka Group

Company Profile Koran Suara Merdeka Group





Saya Neni Nellasari (03066), Mahasiswa ISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan tugas akhir berjudul **“Hubungan Pemberitaan Seputar RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau” (Studi Deskriptif Kuantitatif pada Masyarakat Petani Tembakau di Temanggung, Jawa Tengah)**. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner penelitian ini dengan jawaban sejujurnya. Hasil jawaban kuesioner yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan hanya **digunakan untuk kepentingan akademik saja dan data akan dijaga kerahasiaannya**. Terimakasih.

Lokasi responden

Desa :

Kecamatan :

Bagian I: Identitas Responden

Isi dan beri tanda (X) sesuai dengan pilihan jawaban Anda.

1. Jenis kelamin
 - a. Laki – laki
 - b. Perempuan
2. Apakah Anda mengetahui pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau? Pemberitaan mengenai adanya kebijakan dari pemerintah mengeluarkan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau karena produk tembakau yaitu rokok mengandung 4000 zat kimia yang beracun dan rokok juga mengandung zat adiktif (zat yang memberikan efek kecanduan) sehingga harus ada peraturan yang dapat membatasi produksi rokok.
 - a. Ya (lanjutkan)
 - b. Tidak (berhenti mengisi kuesioner)

(Jika anda menjawab YA lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, jika anda menjawab TIDAK berhentilah mengisi kuesioner ini)

3. Darimana Anda pertama kali mengetahui berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau?
 - a. Keluarga
 - b. Teman-teman
 - c. Media massa, seperti TV, Radio, Koran, Majalah atau internet

(Jika Anda menjawab pilihan C maka Anda wajib mengisi pertanyaan nomor 5, jika menjawab pilihan A dan B, Anda tidak perlu menjawab pertanyaan nomor 5)

4. Apa jenis **media massa** yang Anda gunakan untuk memperoleh informasi tentang RUU Pembatasan Produk Tembakau (*boleh lebih dari satu*)?

☐ Televisi ☐ Radio ☐ Koran ☐ Majalah ☐ Internet

Bagian II: Motif Menggunakan Koran Suara Merdeka

Pilihlah salah satu jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) dan beri tanda (✓) sesuai dengan satu pilihan jawaban Anda.

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
Kebutuhan informasi						
5	Saya mencari informasi melalui Koran Suara Merdeka					
6	Koran Suara Merdeka merupakan sumber informasi bagi saya					
7	Saya mencari informasi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau melalui Koran Suara Merdeka					
8	Koran Suara Merdeka sesuai dengan harapan dan kebutuhan saya tentang informasi berita Pengendalian Dampak Produk Tembakau					
9	Motivasi saya membaca Koran Suara Merdeka adalah untuk menambah pengetahuan mengenai RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau					
Kebutuhan Diversi						
10	Saya membaca Koran Suara Merdeka sebagai sarana untuk mengisi waktu luang					
11	Saya membaca Koran Suara Merdeka sebagai sarana untuk mengatasi persoalan mengenai RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang berkaitan dengan mata pencaharian saya sebagai petani tembakau					
12	Saya membaca Koran Suara Merdeka sebagai hiburan					
Kebutuhan Identitas Personal						
13	Koran Suara Merdeka dapat membantu saya dalam mencari ide untuk berdiskusi atau mengemukakan pendapat.					
14	Koran Suara Merdeka dapat membantu saya dalam mendapatkan informasi perkembangan peristiwa RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau					

Bagian III: Penggunaan media Suara Merdeka

Isi dan beri tanda (X) sesuai dengan pilihan jawaban Anda

15. Berapa sering dalam seminggu Anda membaca berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka?

- Tidak pernah
- Pernah (1 kali dalam seminggu)
- Jarang (2 sampai 3 kali dalam seminggu)
- Sering (4 sampai 5 kali dalam seminggu)
- Sangat sering (6 sampai 7 kali dalam seminggu)

16. Berapa lama Anda membaca berita tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau?

- Kurang dari 15 menit
- 15-30 menit
- 30-45 menit
- 45 menit-1 jam
- Lebih dari 1 jam

(Pilihlah salah satu jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) dan beri tanda (✓) sesuai dengan satu pilihan jawaban Anda.)

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
17	Saya membaca pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka sambil melakukan aktivitas atau kegiatan lain.					
18	Saya mengikuti/menyimak pemberitaan tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Koran Suara Merdeka.					

Bagian IV : Sikap terhadap pemberitaan RUU Pembatasan Produk Tembakau

Pilihlah salah satu jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) dan beri tanda (✓) sesuai dengan satu pilihan jawaban Anda.

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
19	Pada pasal 3 dalam draft RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau disebutkan pengendalian produk tembakau terhadap kesehatan bertujuan untuk mencegah keinginan merokok pada setiap orang,(b) memberikan perlindungan bagi orang yang tidak merokok,(c)melindungi setiap orang dari bahaya merokok, dan (d) menciptakan lingkungan yang bersih sehat, bebas dari asap rokok					
20	RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang terkait dengan kesehatan, menyatakan produk tembakau yaitu rokok mengandung 4000 (zat kimia) yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan, terutama mengandung zat adiktif (zat yang mengakibatkan kecanduan terhadap rokok)					
21	RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau merupakan langkah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia					
22	Saya senang dengan adanya RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau karena mengurangi dampak produk rokok bagi kesehatan					
23	Saya takut pada pemberitaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau karena mengancam mata pencaharian saya sebagai petani tembakau.					
24	Saya takut dengan adanya pemberitaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang akan disahkan menjadi UU pembatasan produk tembakau					
25	Saya akan mendukung RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau karena berdampak positif terhadap kesehatan untuk saya dan masyarakat.					
26	Saya akan terlibat dalam mengawal pelaksanaan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau					
27	Saya akan melakukan aksi menentang kebijakan pemerintah karena RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau merugikan saya sebagai petani tembakau					
28	Saya akan membatalkan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau karena tidak mementingkan mata pencaharian utama saya.					

	Case Processing Summary ^a					
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Desa	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Kec	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Jnskelamin	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
mengetahui pemberitaan	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
darimana mengetahui	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Q4 (Televisi)	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Q4 (Radio)	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Q4 (Koran)	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Q4 (Majalah)	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%
Q4 (Internet)	155	100.0%	0	.0%	155	100.0%

a. Limited to first 155 cases.

Case Summaries^a

	Desa	Kec	Jnskelamin	mengetahui pemberitaan	darimana mengetahui	Q4 (Televisi)	Q4 (Radio)	Q4 (Koran)	Q4 (Majalah)	Q4 (Internet)
1	campursari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
2	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	ya
3	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
4	campursari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
5	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
6	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk

8	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
9	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
10	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
11	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
12	campursari	Bulu	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
13	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
14	campursari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
15	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
16	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
17	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
18	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
19	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
20	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
21	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
22	campursari	Bulu	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
23	campursari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
24	campursari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
25	campursari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
26	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
27	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
28	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
29	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
30	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
31	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
32	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
33	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk

35	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
36	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
37	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
38	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
39	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
40	wonosari	Bulu	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
41	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
42	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
43	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
44	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
45	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
46	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	keluarga	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
47	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
48	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
49	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
50	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
51	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
52	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
53	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
54	wonosari	Bulu	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
55	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
56	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
57	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
58	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
59	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
60	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk

62	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
63	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
64	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
65	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
66	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
67	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
68	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
69	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	keluarga	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
70	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
71	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
72	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
73	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	tdk	ya	ya	tdk	tdk
74	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
75	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
76	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
77	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
78	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
79	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
80	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
81	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
82	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
83	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
84	menggoro	Tembark	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
85	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
86	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
87	menggoro	Tembark	perempuan	Ya	keluarga	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk

89	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
90	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	ya	ya	tdk	tdk
91	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	ya	ya	tdk	tdk
92	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
93	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
94	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	ya	ya	tdk	tdk
95	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
96	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
97	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
98	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
99	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
100	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
101	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
102	lungge	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	ya	ya	tdk	tdk
103	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	tdk	ya	ya	tdk	tdk
104	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
105	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
106	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
107	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	ya	ya	tdk	tdk
108	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	ya	ya	ya	tdk
109	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
110	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk
111	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
112	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	tdk	ya	ya	tdk	tdk
113	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
114	lungge	Temanggung	laki laki	Ya	teman	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk

116	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
117	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
118	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	ya
119	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
120	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
121	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
122	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
123	nampirejo	Temanggung	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
124	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	ya	ya	tdk	tdk
125	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
126	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
127	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
128	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
129	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	tdk	tdk	ya	tdk	tdk
130	nampirejo	Temanggung	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
131	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
132	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
133	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
134	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
135	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
136	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
137	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
138	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
139	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
140	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
141	kacepit	Selopampg	perempuan	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk

143	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
144	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
145	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
146	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
147	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
148	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
149	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
150	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
151	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
152	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
153	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
154	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
155	kacepit	Selopampg	laki laki	Ya	media	ya	tdk	ya	tdk	tdk
Total	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155

a. Limited to first 155 cases.

15 Maret 2010

Tembakau dan Pertumbuhan

- Oleh Rusli Abdulah

SANGAT tidak masuk akal jika ada pendapat yang menyatakan industri rokok nasional menjadi penopang kehidupan ekonomi. Pendapat ini akan benar dalam perspektif jangka pendek. Jika ditelaah lebih jauh, dalam jangka panjang industri rokok akan menjadi beban bagi perekonomian.

Thomas et al (2000), dalam bukunya, *The Quality of Growth*, menyatakan untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan, diperlukan perhatian yang sama terhadap human capital and social capital (sumber daya manusia dan modal sosial), natural and environment capital (sumber daya alam), serta physical and financial capital (sumber daya fisik dan keuangan).

Pada sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, perhatian pembuat kebijakan masih menitikberatkan kepada penggunaan dan pengembangan sumber daya alam serta sumber daya fisik dan finansial.

Dari berbagai pengalaman negara-negara di dunia, penitikberatan pada pengembangan sumber daya alam serta fisik dan finansial dengan menomorduakan sumber daya manusia akan menghasilkan angka pertumbuhan yang tinggi. Namun, tingginya angka pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata (equity) serta berkelanjutan.

Salah satu pengabaikan pengembangan sumber daya manusia adalah tidak adanya langkah-langkah preventif yang tegas dalam konsumsi produk turunan tembakau. Kurang tegasnya langkah preventif pemerintah terhadap kegiatan konsumsi rokok terlihat dalam Road Map Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai tahun 2007 ñ 2020. Dalam road map ini disebutkan bahwa produksi rokok akan ditingkatkan dari 240 miliar batang pada 2007-2010 menjadi 260 miliar batang pada 2015-2020. (VHRMedia, 08/01/2009). Dua Beban Sebuah masyarakat yang sudah mengenal tembakau dan menjadi pecandu, akan menanggung dua beban biaya sekaligus, beban biaya kesehatan dan ekonomi. Biaya kesehatan dari konsumsi rokok yang harus ditanggung oleh penduduk miskin relatif lebih besar jika dibandingkan dengan golongan mampu. Efek yang ditanggung relatif sama, namun kemampuan pendanaan berobat golongan kaya lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk miskin. Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya informasi tentang kesehatan serta gaya hidup yang kurang sehat yang dimiliki oleh golongan miskin daripada golongan mampu. Jadi, orang miskin

lebih cenderung terkena lebih banyak gangguan penyakit selain akibat merokok seperti penyakit demam berdarah, malaria, dan gizi buruk.

Biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat adalah menurunnya produktivitas kerja. Seorang pekerja yang kecanduan tembakau akan lebih rentan terkena berbagai penyakit. Dengan demikian, jumlah hari di mana mereka bisa bekerja berkurang dengan adanya gangguan kesehatan yang memaksa mereka beristirahat.

Penurunan produktivitas ini menjadikan upaya pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kegiatan produksi tidak akan optimal. Yang terjadi kemudian adalah terjadinya efisiensi. Jelas ini adalah kerugian yang harus ditanggung oleh sebuah perekonomian. Dampak ini tidak akan terasa dalam jangka pendek, namun jangka panjang.

Tembakau di Indonesia bisa menghidupi sekitar 6 juta orang. Mereka adalah petani tembakau, buruh pabrik rokok, distributor, biro iklan, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia jasa event organizer (EO) yang menjadikan rokok sebagai sponsor utama kegiatan. Selain itu, tembakau juga “berkontribusi” dalam memutar roda pembangunan nasional. Dari cukai rokok, pemerintah bisa mendapatkan sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya, WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, 2008, menyebutkan Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia pengonsumsi rokok setelah China dan India dengan persentase 5 persen dari jumlah perokok di dunia. Yang lebih ironis lagi jumlah perokok remaja usia 13-15 tahun mencapai 15 persen dari populasi usia tersebut. Smokers usia dini ini didominasi oleh remaja laki-laki 24,1 persen dan 4 persen wanita. Untuk perokok dewasa, usia 15 tahun ke atas, 34,5 persen dengan komposisi perokok pria 63,2 persen dan wanita 4,5 persen.

Dengan melihat komposisi perokok remaja yang 15 persen dan tumbuh setiap tahunnya, bisa dibayangkan apa yang terjadi 20-30 tahun mendatang. Penduduk berusia 15 tahun saat ini adalah para pemimpin negeri ini 20 tahun mendatang. Apa yang akan terjadi jika sebagian dari mereka sakit-sakitan? Apa yang akan bisa mereka wariskan untuk generasi selanjutnya? Salah satu yang akan terjadi adalah program Indonesia Sehat 2010 hanya akan menjadi sejarah, tanpa bukti.

Sangat wajar jika rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan menjadi sebuah keputusan yang dilematis. Keberadaan tembakau telah menghidupi jutaan rakyat Indonesia sekaligus penyumbang pendapatan yang besar bagi Negara. Namun, di sisi lain tembakau juga menjadi “pembunuh” bagi penghisapnya.

Ketika candu tembakau sudah mengakar erat di masyarakat kita, maka diperlukan kebijakan komprehensif, sistematis serta bertahap, bukan kebijakan sepihak. Apalagi jika permasalahan tembakau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama golongan menengah ke bawah.

Akan sulit dan tidak menjadi kebijakan populis jika pemerintah dengan serta merta melarang rokok. Yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat konsumsi dan produksi secara bertahap.

Untuk mengurangi tingkat konsumsi, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ketentuan usia berapa seseorang boleh merokok, pelarangan iklan di media cetak dan elektronik, dan memberikan terapi gratis untuk menghilangkan kecanduan rokok.

Dari sisi produksi, pemerintah harus memberikan alternatif komoditas pengganti tembakau yang bisa digunakan untuk menghidupi petani tembakau. Namun hingga kini, pemerintah tampaknya juga tidak siap untuk “membawa” petani tembakau beralih ke komoditas lain. Rasanya pemerintah belum berbuat banyak untuk program pengalihan perhatian komoditas. (SM/02/03/10).

Jika alasan biaya menjadi penghambat program tersebut, boleh saja pemerintah memanfaatkan dana cukai rokok serta corporate social responsibility (CSR) dari produsen rokok untuk program tersebut. Yang diperlukan oleh pemerintah sekarang bukan hanya seperangkat peraturan, melainkan juga keberanian, ketegasan, dan konsistensi. (10)

— Rusli Abdulah, alumnus Fakultas Ekonomi Undip, peneliti di Institute for Economics Research and Social Studies Semarang

Koran Suara Merdeka

Ekonomi & Bisnis

12 April 2010

RPP Tembakau agar Dibahas Ulang

BANDUNG - Kementerian Koordinator Perekonomian meminta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan dibahas ulang.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, mengatakan RPP tersebut mengandung banyak aturan yang berada di luar kompetensi untuk mengatur dampak tembakau. "Kantor Menko Perekonomian protes, kami minta dibahas ulang," ujarnya di sela-sela workshop Forum Wartawan Keuangan dan Ekonomi Moneter (Forkem) tentang APBN 2010 di Bandung, Sabtu lalu.

Menurut Edy, pada dasarnya pihaknya menyetujui tujuan pembatasan dampak rokok tembakau. Namun, tidak setuju jika RPP tersebut terlalu mengatur secara detail industri rokok. Misalnya soal aturan jumlah rokok dalam satu kemasan dan soal iklan yang berarti sudah memasuki kewenangan instansi. "Soal iklan kan sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen," imbuhnya. Empat Kementerian Saat ini, lanjut Edy, pembahasan RPP Tembakau melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

Dia menambahkan salah satu penyebab RPP Tembakau memicu resistensi dari dunia usaha adalah karena sejak awal pembahasan para pelaku usaha tidak dilibatkan secara intens. "Sebagian malah tahu (RPP Tembakau) dari koran," ucapnya.

Pembahasan RPP Tembakau, lanjut dia, bisa saja sudah mengundang pelaku usaha namun tidak mewakili industri secara keseluruhan. Akibatnya, suara dari pelaku usaha belum sepenuhnya terakomodasi.

"Jadi, secara kebijakan belum dibahas interdekt dulu, sehingga kami minta dibahas lagi bersama-sama. Maksudnya, aturannya jangan terlalu lebay (berlebihan-Red)," katanya. (J10-27)

Kadin: Penetapan Tembakau sebagai Zat Adiktif Rugikan Petani

Boyolali, Cybernews. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Boyolali menilai, jika rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai zat adiktif bagi Kesehatan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah (PP) sangat merugikan petani.

Sekretaris Kadin Kabupaten Boyolali, Priyandono, mengatakan, RPP tersebut akan berdampak luas di wilayah tersebut karena banyak petani dan produsen rokok yang menggantungkan hidupnya dari komoditas itu.

Priyandono meminta Pemkab Boyolali menolak RPP ke pusat karena akan merugikan dan dapat berdampak pada perekonomian rakyat di kabupaten ini.

"Jika RPP itu ditetapkan menjadi PP maka mengganggu masyarakat yang menggantungkan dari hasil tanaman itu," katanya saat menanggapi terkait RPP Pengamanan Produk Tembakau yang akan ditetapkan menjadi PP baru untuk menggantikan PP Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Produk Rokok Bagi Kesehatan.

Menurut dia, sejumlah pasal dalam RPP yang dinilai sangat kontroversial di antaranya, larangan orang untuk memproduksi dan atau mengimpor rokok, terutama dalam menentukan isi tiap kemasan rokok.

"Maksud pelarangan itu, bertujuan agar harga rokok tidak terjangkau oleh konsumen," katanya.

Hal tersebut, kata dia, akan membawa dampak yang sangat luas. Bahkan, dapat mematikan usaha rakyat terutama petani tembakau dan industri rokok skala kecil, termasuk di wilayah Boyolali.

"Kabupaten Boyolali, kini cukup banyak pabrik rokok skala kecil," katanya.

Menurut dia, alasan tersebut bersifat diskriminatif, tidak ada relevansinya dengan harga. Selain itu, pada pasal 9 setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran atau per batang. Penerapan pasal ini jelas berakibat mematikan pedagang eceran yang jumlahnya banyak dan membatasi konsumen tingkat bawah.

Priyandono menjelaskan, keberadaan pabrik rokok tersebut cukup banyak memberikan dampak positif, khususnya di sektor perekonomian rakyat.

Selain itu, kata dia, petani tembakau di wilayah Boyolali telah berkembang dan menyebar di sejumlah kecamatan menjadi kawasan sentra produksi yang dikenal secara luas. Hal tersebut,

kata dia, jangan dirusak atau hapus karena dengan melarang orang memproduksi rokok, tetapi cukup dengan cara membatasi orang merokok dengan berbagai program yang komprehensif.

Kendati demikian, kata dia, Kadin Boyolali segera mengambil langkah dengan konsolidasi terhadap kalangan pengusaha pabrik rokok, petani, dan organisasi pertembakauan setempat.

Pihaknya tetap mengharapkan pihak pemerintah dapat mendengarkan aspirasi berbagai pihak secara langsung terkait dengan produksi tembakau, sebelum RPP itu disahkan menjadi PP.

(**Ant** /CN12)



Berita Utama

02 Maret 2010

RPP Tembakau Dikaji Ulang



SM/Bayu G Murti

ROKOK TIRUAN: Petani tembakau asal Jateng menyulut rokok tiruan berukuran besar saat berunjuk rasa di DPR, Jakarta, Senin (1/3). (30)

JAKARTA- Perjuangan para petani tembakau menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, tak sia-sia. RPP yang menuai kontroversi tersebut akan ditinjau ulang.

Kementerian Hukum dan HAM menegaskan, RPP itu ditinjau ulang karena pembahasannya belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (Ditjen PP) Kemenkumham, Danan, RPP tersebut telah masuk ke Direktorat Harmonisasi Ditjen PP, namun dikembalikan ke Kementerian Kesehatan.

”Draf RPP kami kembalikan ke Kementerian Kesehatan untuk dikaji ulang. Pengembalian tersebut agar dalam pembahasannya melihat seluas-luasnya seluruh stakeholder,” ujarnya di sela-sela menemui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah yang melakukan aksi di kantor Kemenkumham, Senin (1/3).

Dia berjanji akan melibatkan unsur masyarakat dari APTI dalam pembahasan RPP tersebut. Dalam aksinya, APTI menolak RPP Pengamanan Produk Tembakau. Sekjen APTI Agus Setiawan menegaskan, APTI khawatir, jika RPP diberlakukan, maka akan menyebabkan hilangnya budaya pertanian tembakau dan pengelolaan tembakau menjadi rokok kretek. Padahal, rokok kretek merupakan kreasi asli Indonesia.

”Petani tembakau juga akan kehilangan komoditas andalan yang memiliki potensi ekonomi sangat tinggi,” ujar Agus.

Selain itu, RPP itu juga dapat mengancam perdagangan dan industri tembakau asli Indonesia. "Jutaan petani tembakau dan keluarganya akan terancam kehilangan sumber pendapatan," tegasnya.

APTI melakukan aksi di tiga tempat terpisah, yakni Gedung DPR, kantor Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rilis yang ditandatangani Ketua DPD APTI Jawa Tengah N Wisnu Brata disebutkan, peserta aksi mencapai 4.000 petani tembakau Jawa Tengah. Mereka berasal dari Temanggung, Wonosobo, Magelang, Klaten, dan Kendal.

Ketua DPR Marzuki Alie juga menyatakan perlunya peninjauan ulang terhadap RPP No 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan.

Menurutnya, penyusunan suatu peraturan seharusnya mengakomodasi seluruh aspek dan elemen terkait, bukan berpihak hanya pada satu aspek atau elemen saja. "Aturan itu tidak boleh diskriminatif. Jadi, dalam menyusun RPP juga harus mempertimbangkan aspek dari petani tembakau," ujar Marzuki saat menerima perwakilan APTI di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, komisi-komisi di DPR yang terkait RPP akan bersinergi dan berkoordinasi dengan menggelar rapat dengar pendapat gabungan untuk memanggil pemerintah.

Ketua APTI Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, PP No 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengamanan rokok bagi kesehatan masih sangat relevan dan komprehensif, baik dilihat dari aspek kesehatan maupun dalam mengakomodasi komoditas tembakau. "Bagi kami, PP 19/2003 itu sudah sangat relevan, karena sudah mengatur batasan orang merokok dan juga batasan untuk iklan rokok," katanya.

Dia menjelaskan, penolakan petani tembakau disebabkan RPP tersebut tendensius dan akan membunuh kelangsungan hidup serta pekerjaan para tani dan buruh. "Pada dasarnya kami setuju dan senang dengan PP tentang pengamanan tembakau. Namun, semangatnya harus berdasarkan PP 19/2003," tambah Wisnu.

Senada dengan Marzuki, Wisnu juga menyatakan bahwa suatu peraturan seharusnya didasarkan atas banyak aspek. "Tidak bisa hanya menampung aspirasi dari orang yang antitembakau, sedangkan kami dari orang yang hidup dari tembakau justru dimatikan," tegasnya. Ketua DPRD Temanggung, Bambang Sukarno menambahkan, jika nantinya RPP tersebut terus dibahas dan disahkan, maka akan ada jutaan masyarakat Indonesia yang terkena dampaknya, khususnya para petani dan buruh tembakau.

"Jika RPP disahkan, akan ada 30 juta orang di seluruh Indonesia yang kehilangan lapangan pekerjaan. Pendapatan negara juga akan hilang sekitar Rp 64 triliun per tahun yang didapat dari cukai dan pajak," katanya. (J13,K32,J22-49,65)